

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Entitas Akuntansi terhadap *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Indonesia, maka pada bagian akhir dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Artinya setiap terjadinya peningkatan Ukuran Pemerintah Daerah, maka akan diikuti dengan besarnya *Audit Delay* yang terjadi di pemerintah provinsi di Indonesia. Pemerintahan yang besar mempunyai sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan. Pada akhirnya penyampaian laporan keuangan akan lebih tepat waktu dan memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan.
2. Temuan Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Artinya setiap terjadinya peningkatan Temuan Audit, maka akan diikuti dengan besarnya *Audit Delay* yang terjadi di pemerintah provinsi di Indonesia. Pemerintahan yang mempunyai temuan audit yang lebih banyak akan memerlukan waktu pembahasan lebih lama sebelum temuan tersebut diangkat dalam laporan hasil pemeriksaan, sehingga *audit delay* akan semakin lama.
3. Jumlah Entitas Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Artinya setiap terjadinya peningkatan Jumlah Entitas Akuntansi, maka akan diikuti dengan besarnya *Audit Delay* yang terjadi di pemerintah provinsi di Indonesia. Pemerintahan dengan jumlah entitas akuntansi yang besar perlu melakukan proses kooperasi dan koordinasi antar entitas akuntansi, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam pelaporan keuangan.

4. Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Entitas Akuntansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Delay*. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit dan Jumlah Entitas Akuntansi meningkat, maka dapat meningkatkan pula *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Indonesia. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 37.9%, sedangkan sisanya sebesar 62.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati atau diteliti.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah provinsi di Indonesia

Diharapkan pemerintah daerah dapat meminimalisir *audit delay* yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan kontrol internal yang lebih baik dalam pengelolaan keuangannya dan penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dengan melibatkan sumber daya manusia yang lebih terampil bukan hanya sekedar kuantitasnya saja berdasarkan jumlah entitas akuntansi. Besarnya suatu pemerintah daerah yang dilihat dari jumlah aset yang dimiliki mengalami peningkatan setiap tahunnya, diharapkan pemerintah daerah juga dapat konsisten dalam ketepatanwaktuan. Selain itu Pemerintah Provinsi di Indonesia diharapkan dapat menyusun laporan keuangannya dengan baik, dalam rangka penekanan jumlah temuan audit yang material.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Disarankan bagi peneliti yang tertarik meneliti lebih lanjut terkait *audit delay* pemerintahan sekiranya dapat mengembangkan variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap *audit delay* laporan keuangan pemerintahan.

- b. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan setiap tingkatan pemerintah daerah di Indonesia, seperti provinsi, kabupaten dan kota agar memiliki hasil penelitian yang lebih representatif.
- c. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah jangka waktu penelitian guna meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian dan keterbaruan penelitian.
- d. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih banyak referensi pustaka, baik yang bersumber dari buku maupun artikel.